Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Triwulan III
Tahun 2025



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatNya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan disampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III. Semoga laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat digunakan sebagai acuan dan perbaikan bagi kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dimasa yang akan datang.

Nganjuk, Oktober 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. SRI HANDARININGSIH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680110 199412 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang..... 1

I.2. Landasan Hukum..... 2

I.3. Maksud dan Tujuan..... 2

I.4. Sistematika Penulisan..... 3

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah..... 3

BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TRIWULAN III TAHUN 2025

II.1.Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 6

II.2.Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran..... 6

II.3.Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah..... 7

II.4. Analisis Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 18

II.5. Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III..... 28

II.6. Analisis Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025..... 43

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 54

III.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah..... 55

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan..... 68

IV.2. Tindak lanjut..... 68

BAB I
PENDAHULUAN

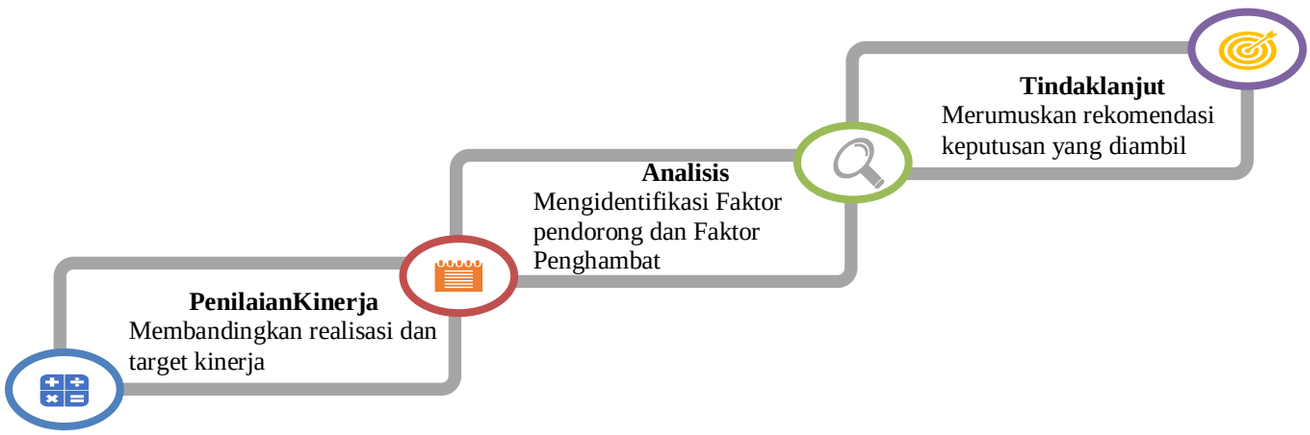
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan Pilihan Industri dan Perdagangan, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai triwulan III melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target

kinerja tujuan dan sasaran, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten NganjukTahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN,
   Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gapanalysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥91%	Sangat Tinggi
2.	76%≤90%	Tinggi
3.	66%≤ 75%	Sedang

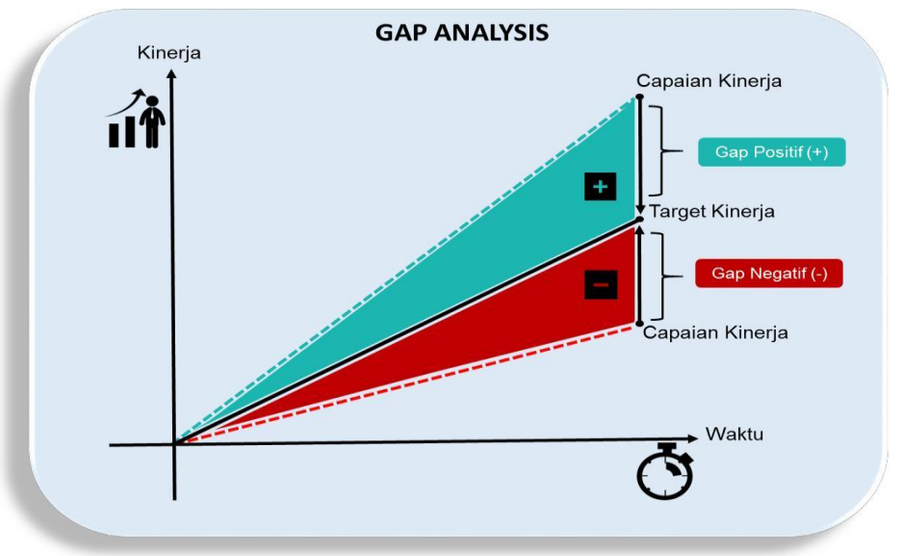
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja.*Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2.*GapAnalysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



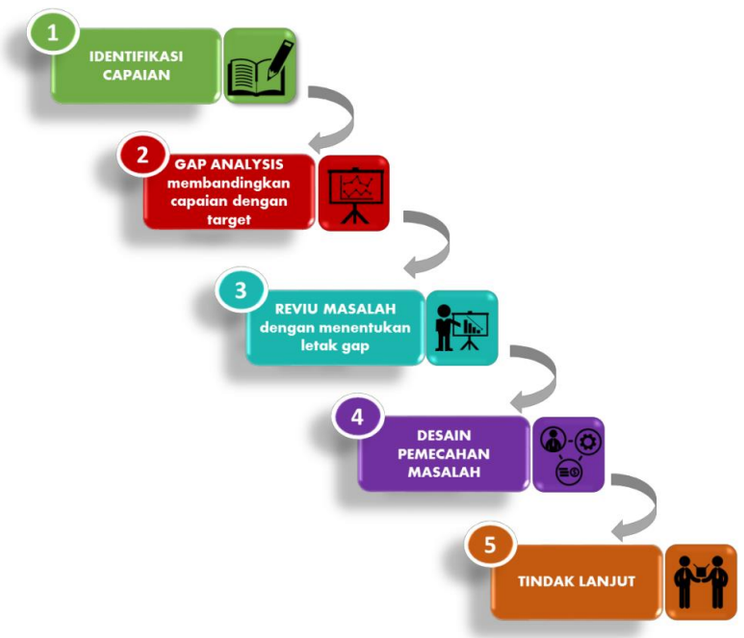
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-).*Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap*akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gapanalysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *uptodate*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TRIWULAN III TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Capaian kinerja Tujuan dan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Tujuan Meningkatnya Produktivitas sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor industri	11,90	-	-
		Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor perdagangan	5,50	-	-
	Meningkatnya Nilai Produktivitas industri	Persentase Peningkatan Nilai produksi sektor industri	2,2%	1,67%	75,91%
	Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	2,18%	1,71%	78,44%

II.2 Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Capaian Tujuan Meningkatnya Produktivitas sektor industri dan perdagangan Dengan Indikator Tujuan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Pengukurannya dilaksanakan di akhir tahun hal ini dikarenakan Data Tersebut dikeluarkan diakhir tahun/ data belum tersedia.

Tujuan Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk adalah Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan dengan 2 Sasaran Yaitu :

a. Meningkatnya Nilai Produktivitas industri dengan Indikator sasaran:
   1. Persentase Peningkatan Nilai produksi sektor industri

b. Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan dengan Indikator sasaran

1. Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan

Capaian Kinerja Masing masing Indikator diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Nilai Produktivitas industri dengan Indikator sasaran:

  1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

     Indikator Kinerja Pertambahan Jumlah Industri kecil dan Menengah menargetkan sebesar 2,2% dan terealisasi sebesar 1,67% dengan Tingkat capaian sebesar 75,91%.

- Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran :

  1. Persentase Peningkatan omzet sektor perdagangan

     indikator Persentase Peningkatan omzet sektor perdagangan yang menargetkan sebesar 2,18% dan terealisasi sebesar 1,71% dengan Tingkat capaian sebesar 78,44%.

II.3. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	90%	48%	53,33%
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	90%	48%	53,33%
	Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	25 Dokumen	12 Dokumen	48%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan	2 Dokumen	0 Dokumen	0%

	Izin Usaha Toko Swalayan	Izin usaha Toko swalayan yang di proses			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Omzet Perdagangan	*1.089 Milyar*	*737,32 Milyar*	*67,71%*
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 unit	0 unit	0%
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 unit	0 unit	0%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35 Pasar	0 Pasar	0%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	*1 Dokumen*	*0 Dokumen*	0%

	Distribusi Perdagangan	Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
3	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	96%	90%	93,75%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	4 Laporan	3 Laporan	75%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	4 Laporan	3 Laporan	75%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Pengawasan Pupuk dan	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk	4 Laporan	3 Laporan	75%

	Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	4 Laporan	3 Laporan	75%
4	**Program Pengembangan Ekspor**	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	*60%*	0%	0%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi	*12 Pelaku Usaha*	*0 Pelaku Usaha*	0%
	misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	*10 Pelaku Usaha*	*0 Pelaku Usaha*	0%
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	*5 Produk*	*0 Produk*	0%
5	**Program Standarisasi**	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya	*85,55%*	*54%*	*63,12%*

	dan Perlindungan Konsumen	(UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku			
	pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	8555 UTTP	4589 UTTP	53,64%
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	8555 Unit	4589 UTTP	53,64%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	*750 Orang*	*464 Orang*	61,87%
6	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	*58,44 %*	*122%*	208,76%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 UMKM	55 UMKM	55%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	55 UMKM	55%

7	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun	*57%*	*20%*	*35,09%*
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	*7 Dokumen*	*2 Dokumen*	*28,57%*
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	*1 Dokumen*	*0 Dokumen*	*0%*
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	*0%*
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*1 Dokumen*	*0 Dokumen*	*0%*
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*50%*

	Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan			
8	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri	79%	58,97%	74,65%
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Dokumen	8 Dokumen	24,24%
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	7 Dokumen	8 Dokumen	*114,29%*
9	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	*25%*	18,84%	75,36%
	Penyediaan informasi	Jumlah DokumenPenyediaan	4 Dokumen	1 Dokumen	25%

	industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
10	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP DISPERINDAG	*85,30*	*82,30*	*96,48%*
	Perencanaan, Penganggaran dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	*17 Dokumen*	*20 Dokumen*	117,65%

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*17 Dokumen*	15 *Dokumen*	88,24%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*4 Dokumen*	*3 Dokumen*	*75%*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*4 Dokumen*	*3 Dokumen*	*75%*
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*104 Dokumen*	*102 Dokumen*	*98,08%*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	64 orang/bulan	91,42%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	*60 Dokumen*	80 Dokumen	133,33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*1 Laporan*	*0 Laporan*	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	25 Laporan	19 Laporan	76%

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	*4 Dokumen*	3 *Dokumen*	75%
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	8 Paket	80%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	6 Paket	75%
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	7 Paket	58,33%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	9 Dokumen	75%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	3 Laporan	75%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	4 Laporan	3 Laporan	75%

		dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Unit	20 Unit	166,67%
	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	7 Unit	175%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 Unit	13 Unit	52%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	3 Laporan	300%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	7 Unit	159 Unit	*71,43%*

	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	2 Unit	*200%*
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	16 Unit	*66,67%*
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	111 Unit	1.110%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	37 Unit	*185%*
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	18 Laporan	0 Laporan	0%

II.4 Analisis Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
   - Capaian Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan Indikator Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan menargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 48% dengan Tingkat capaian sebesar 53,33%.

- Kegiatan penerbitan tanda daftar gudang dengan Indikator Persentase penerbitan TDG yang diterbitkan menargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 48% dengan Tingkat capaian sebesar 53,33%.
- Sub Kegiatan Fasiitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan menargetkan sebesar 25 Dokumen dan terealisasi sebesar 12 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 48%.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Indikator Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses yang diterbitkan menargetkan sebesar sebesar 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan menargetkan sebesar sebesar 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

2. Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

   Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan diantaranya :

   1. Pembangunan dan pengeolaan sarana distribusi perdagangan
   2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

   - Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Indikator omzet perdagangan menargetkan sebesar 1.089 milyar dan terealisasi sebesar 737,32 milyar dengan Tingkat capaian sebesar *67,71%.*
   - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan menargetkan sebesar 8 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Dengan Indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diterbitkan

menargetkan sebesar 6 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

- Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan Indikator Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan menargetkan sebesar 35 pasar dan terealisasi sebesar 0 pasar dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan menargetkan sebesar 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

3. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari 2 yaitu

a. Kegiatan yaitu pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan
   1 Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   a. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

Berikut dijelaskan masing masing capaian indikator :

1. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan Indikator Persentase Pengawasan Harga Pokok menargetkan sebesar 96% dan terealisasi sebesar 90% dengan Tingkat capaian sebesar 93,75%.
2. Capaian Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%.
3. Capaian Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1

(satu) Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%.

4. Capaian sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota dengan indikator Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota menargetkan 2 Laporan dan terealisasi 2 laporan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
5. Capaian Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator jumlah laporan pengawasan penyaluran dan pengunaan Pupuk dan pestisida bersubsidi menargetkan sebesar 4 Laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%.
6. Capaian Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan Indikator Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%.

2 Capaian Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor menargetkan 60% dan terealisasi sebesar 0% dengan Tingkat capaian sebesar 0%

- Capaian Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah pelaku usaha ekspor yang difasilitasi menargetkan 12 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian sub kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dalam misi dagang produk unggulan menargetkan 10 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian sub kegiatan peningkatan citra produk dalam negeri dengan indikator jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosimenargetkan 5 produk dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

.

3 Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen.

1. Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan Indikator Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku yang diterbitkan menargetkan sebesar 85,55% dan terealisasi sebesar 54% dengan Tingkat capaian sebesar 63,12%.
2. Capaian kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan Indikator Jumlah Unit Pelaksanaan Metrology Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan menargetkan sebesar 8555 UTTP dan terealisasi sebesar 4589 UTTP dengan Tingkat capaian sebesar 53,64%.
3. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan Indikator Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang menargetkan sebesar 8555 unit dan terealisasi sebesar 4589 unit dengan Tingkat capaian sebesar 53,64%.

4 Sub kegiatan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal dengan Indikator Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina menargetkan sebesar 750 orang dan terealisasi sebesar 464 orang dengan Tingkat capaian sebesar 61,87%.

Capaian Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

1. Capaian program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk menargetkan sebesar 58,44% dan terealisasi sebesar 25% dengan Tingkat capaian sebesar 42,78%
2. Capaian Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan Indikator Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri menargetkan sebesar 100 UMKM dan terealisasi sebesar 55 UMKM dengan Tingkat capaian sebesar 55%
3. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkatkan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri menargetkan sebesar 100 UMKM dan terealisasi sebesar 55 UMKM dengan Tingkat capaian sebesar 55%.

5 Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri.

1. Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun menargetkan sebesar 57% dan terealisasi sebesar 20% dengan Tingkat capaian sebesar 35,09%.

2. Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 7 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 28,57%.
3. Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri dengan indikator jumah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri mentargertkan 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
4. Capaian Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan indikator jumah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat mentargertkan 2 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 50%.
5. Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri mentargertkan 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
6. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan mentargertkan 2 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 50%.

6 Capaian Program pengendalian izin usaha industri

1. Capaian Program pengendalian izin usaha industri Indikator Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industri di SIINas menargetkan sebesar 79% dan terealisasi sebesar 58,97% dengan Tingkat capaian sebesar 74,65%.
2. Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (UIU), Izin Perluasan Usaha Indstry (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan

menargetkan sebesar 33 Dokumen dan terealisasi sebesar 8 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 24,24%.

3. Capaian Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA)dengan indikator jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA) bagi penanaman modal dalam negeri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menargetkan sebesar 7 Dokumen dan terealisasi sebesar 8 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 114,29%

7 Capaian Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

1. Capaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan Indikator Persentase Pengelolaan Data dalam SIINas menargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 18,84% dengan Tingkat capaian sebesar 75,36%.
2. Capaian Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenanangan Kabupaten/kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 25%.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui system informasi industri nasional (SIINas) dengan Indikator Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 50%.
4. Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas dengan indikator Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan Perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke

SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

8. Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

   Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 85,30 dan terealisasi sebesar 82,30

   Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menargetkan sebesar 17 Dokumen dan terealisasi sebesar 20 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 117,65%

   1. Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan menargetkan sebesar 17 Dokumen dan terealisasi sebesar 15 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 88,24%.
   2. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%.
   3. Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%
   4. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 104 dokumen dan terealisasi sebesar 102 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 98,08%.
   5. Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menargetkan sebesar 70 orang dan terealisasi sebesar 64 orang dengan Tingkat capaian sebesar 91,42%
   6. Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi keuangan SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 60 dokumen dan terealisasi sebesar 26 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 43,33%.

7. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%
8. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 25 laporan dan terealisasi sebesar 19 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 76%.
9. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 dokumen dan terealisasi sebesar 3 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 75%.
10. Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan menargetkan sebesar 10 paket dan terealisasi sebesar 8 paket dengan Tingkat capaian sebesar 80%.
11. Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan Indikator Jumlah Paket bahan logistik yang Disediakan menargetkan sebesar 8 paket dan terealisasi sebesar 6 paket dengan Tingkat capaian sebesar 75%.
12. Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan menargetkan sebesar 12 paket dan terealisasi sebesar 7 paket dengan Tingkat capaian sebesar 58,33%.
13. Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang Disediakan menargetkan sebesar 12 dokumen dan terealisasi sebesar 9 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 75%.
14. Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu dengan Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%.
15. Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%.

16. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah dengan indikator Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah yang disediakan menargetkan 12 unit dan terrealisasi sebesar 20 Unit tingkat capaian sebesar 166,67%.
17. Sub Kegiatan Pengadaan mebel dengan indikator jumah paket mebel yang disediakan menargetkan 4 unit terrealisasi sebesar 7 unit tingkat capain sebesar 175%.
18. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan menargetkan sejumlah 25 Unit dan terrealisasi sebesar 13 unit tingkat capaian sebesar 52%.
19. Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 100%
20. Sub Kegiatan penyedia jasa surat menyurat dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 100%
21. Sub kegiatan penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
22. Sub Kegiatan penyedia jasa pelayanan umum kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%
23. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Indikator Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 7 unit dan terealisasi sebesar 159 unit dengan Tingkat capaian sebesar 71,43%
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang diterbitkan

menargetkan sebesar 1 unit dan terealisasi sebesar 2 unit dengan Tingkat capaian sebesar 200%.

25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya yang diterbitkan menargetkan sebesar 24 unit dan terealisasi sebesar 16 unit dengan Tingkat capaian sebesar 66,67%.
26. Sub Kegiatan pemeliharaan mebel dengan Indikator Jumlah mebel yang di pelihara menargetkan sebesar 10 unit dan terealisasi sebesar 111 unit dengan Tingkat capaian sebesar 1.110%
27. Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara menargetkan sebesar 20 unit dan terealisasi sebesar 37 unit dengan Tingkat capaian sebesar 185%.
28. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
29. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Indikator jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD menargetkan sebesar 18 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

II.5. realisasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	Capaian
1	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	39.836.000	24.354.785	61,14%

		IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan			
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	32.461.000	22.172.785,42	68,31%
	Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	32.461.000	22.172.785,42	68,31%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses	7.375.000	2.182.000	29,59%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7.375.000	2.182.000	29,59%

2	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Omzet Perdagangan	4.495.298.900	2.807.740.816,54	62,46 %
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.280.479.900	2.708.135.286,20	63,27%
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4.280.479.900	2.708.135.286,20	63,27%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	214.819.000	99.605.530,34	46,37%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	214.819.000	99.605.530,34	46,37%
3	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	95.181.000	25.171.000	26,45%
	Pengendalian Harga, dan Stok	Jumlah Laporan Informasi Harga	57.531.000	21.821.000	37,93%

	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	30.226.000	14.585.000	48,25%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	27.305.000	*7.236.000*	*26,50%*
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di	37.650.000	3.350.000	8,90 %

		tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	37.650.000	3.350.000	8,90 %
4	**Program Pengembangan Ekspor**	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	38.854.000	5.099.000	13,12 %
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi	38.854.000	5.099.000	13,12 %
	misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	32.133.000	0	*0%*
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun	6.721.000	5.099.000	*75,87%*

		menjadi materi promosi			
5	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapanny a (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	90.396.800	62.460.370	69,10%
	pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	90.396.800	62.460.370	69,10%
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	52.450.800	34.432.585	65,65%
	Pengawasan/Peny uluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	37.946.000	28.027.785	73,86%
6	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	207.464.550	128.644.171,32	62,01%

	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	207.464.550	128.644.171,32	62,01%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	207.464.550	128.644.171	62,01%
7	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun	392.200.000	223.655.867	57,03 %
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	392.200.000	223.655.867	57,03 %
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah dokumen hasil	38.360.000	*1.140.000*	*2,97%*

	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	336.280.000	217.275.867	*64,61%*
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	0	*0%*
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan	17.560.000	*5.240.000*	*29,84%*
8	**Program Pengendalian**	Persentase pemantauan	59.502.000	21.750.783,02	36,55%

	Izin Usaha Industri	dan pengawasan izin usaha industri			
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	59.502.000	21.750.783,02	36,55%
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	59.502.000	21.750.783,02	36,55%

9	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	92.736.000	23.132.785,42	24,94 %
	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	92.736.000	23.132.785,42	24,94%
	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas	31.566.000	19.232.785,42	60,93%
	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri	61.170.000	3.900.000,00	6,38%

	penyampaian data ke SIINas	dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas			
10	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Survei Keputusan Masyarakat	*10.816.299.815*	6.712.347.882,94	62,06%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.896.000	24.543.000,00	79,44 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.926.000	18.739.000,00	78,32%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.524.000	3.930.000,00	86,87%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	2.446.000	1.874.000,00	76,61%

		Perangkat Daerah			
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.820.096.118	5.473.281.471,00	62,05%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.766.213.118	5.437.998.471,00	62,03%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	49.980.000	33.320.000,00	66,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.316.000	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi	2.587.000	1.963.000,00	75,88 %

		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	824.970.680	594.195.813,00	72,03%
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8.998.400	6.924.700,00	76,95%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	46.152.880	44.452.075,00	96,31%
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	634.221.400	462.685.880,00	72,95%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6.000.000	4.440.000,00	74,00%

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.250.000	10.862.600,00	46,72%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.348.000	64.830.558,00	60,96%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321.174.005	191.360.000,00	59,58%
	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	7.200.000	7.200.000,00	100%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	313.974.005	184.160.000,00	58,65%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.939.812	361.106.336,94	56,69%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	100%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	381.907.812	193.726.839,00	50,73%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	250.032.000	162.379.497,94	64,94%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	176.341.200	65.292.262,00	37,03%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	64.620.000	22.600.048,00	34,97%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	79.176.200	25.357.214,00	32,03%

	Operasional atau lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4.995.000	4.960.000,00	99,30%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27.550.000	12.375.000,00	44,92%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	5.882.000	2.569.000,00	43,68 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	5.882.000	2.569.000,00	43,68 %

II.6 Analisis Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tahun 2025

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
   - Capaian Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan Indikator Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan menargetkan sebesar Rp. 39.836.000dan terealisasi sebesar Rp. 24.354.785,42 dengan Tingkat capaian sebesar 61,14%.
   - Kegiatan penerbitan tanda daftar gudang dengan Indikator Persentase penerbitan TDG yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 32.461.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.172.785,42 dengan Tingkat capaian sebesar 68,31%

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 32.461.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.172.785,42 dengan Tingkat capaian sebesar 68,31%.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Indikator Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses yang diterbitkan menargetkan sebesar sebesar Rp. 7.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.182.000 dengan Tingkat capaian sebesar 29,59%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan menargetkan sebesar sebesar Rp. 7.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.182.000 dengan Tingkat capaian sebesar 29,59%.

2. Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

   Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan diantaranya :

   a. Pembangunan dan pengeolaan sarana distribusi perdagangan
   b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

   - Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Indikator omzet perdagangan menargetkan sebesar Rp. 4.495.298.900 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 2.807.740.816,54 dengan Tingkat capaian sebesar 62,46%
   - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan menargetkan sebesar Rp. 4.280.479.900 dan terealisasi sebesar Rp. 2.708.135.286,20 dengan Tingkat capaian sebesar 63,27%
   - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Dengan Indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp 4.280.479.900 dan terealisasi sebesar Rp. 2.708.135.286,20 dengan Tingkat capaian sebesar 63,27%

- Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan Indikator Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan menargetkan sebesar Rp. 214.819.000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.605.530,34 dengan Tingkat capaian sebesar 46,37%
- Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan menargetkan sebesar Rp. 214.819.000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.605.530,34 dengan Tingkat capaian sebesar 46,37%

3. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

   Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari 2 yaitu

   a. Kegiatan yaitu pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan
      1. Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
      2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   b. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

   Berikut dijelaskan masing masing capaian indikator :

- Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan Indikator Persentase Pengawasan Harga Pokok menargetkan sebesar Rp. 95.181.000 dan terealisasi sebesar Rp. 25.171.000 dengan Tingkat capaian sebesar 26,45%.
- Capaian Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota menargetkan sebesar Rp. 57.531.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.821.000 dengan Tingkat capaian sebesar 37,93%.
- Capaian Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku

usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 30.226.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.585.000 dengan Tingkat capaian sebesar 48,25%

- Capaian sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak daam 1 kabupaten/kota dengan indikator Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota menargetkan Rp. 27.305.000 dan terealisasi Rp. 7.236.000 dengan tingkat capaian sebesar 26,50%
- Capaian Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator jumlah laporan pengawasan penyaluran dan pengunaan Pupuk dan pestisida bersubsidi menargetkan sebesar Rp. 37.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. *3.350.000* dengan Tingkat capaian sebesar 8,90%
- Capaian Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan Indikator Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% yang diterbitkan menargetkan Rp. 37.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.350.000 dengan Tingkat capaian sebesar *8,90%.*

4. Capaian Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor menargetkan Rp. 38.854.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.099.000 dengan Tingkat capaian sebesar 13,12%
   - Capaian Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah pelaku usaha ekspor yang difasilitasi menargetkan Rp. 38.854.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.099.000 dengan Tingkat capaian sebesar 13,12%
   - Capaian sub kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dalam misi dagang produk unggulan menargetkan Rp. 32.133.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
   - Capaian sub kegiatan peningkatan citra produk dalam negeri dengan indikator jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi menargetkan Rp. 6.721.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.099.000 dengan Tingkat capaian sebesar 75,87%
5. Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen.
   - Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan Indikator Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku yang diterbitkan menargetkan

sebesar Rp. 90.396.800 dan terealisasi sebesar Rp. 62.460.370,84 dengan Tingkat capaian sebesar 69,10%

- Capaian kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan Indikator Jumlah Unit Pelaksanaan Metrology Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan menargetkan sebesar Rp. 90.396.800 dan terealisasi sebesar Rp. 62.460.370,84 dengan Tingkat capaian sebesar 69,10%
- Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan Indikator Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang menargetkan sebesar Rp. 52.450.800 dan terealisasi sebesar Rp. 34.432.585,42 dengan Tingkat capaian sebesar 65,65%.
- Sub kegiatan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal dengan Indikator Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina menargetkan sebesar Rp. 37.946.000 dan terealisasi sebesar Rp. 28.027.785,42 dengan Tingkat capaian sebesar 73,86%

6. Capaian Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
   - Capaian program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk menargetkan sebesar Rp. 207.464.550 dan terealisasi sebesar Rp. 128.644.171,32 dengan Tingkat capaian sebesar 62,01%
   - Capaian Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan Indikator Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri menargetkan sebesar Rp. 207.464.550 dan terealisasi sebesar Rp. 128.644.171,32 dengan Tingkat capaian sebesar 62,01%.
   - Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkatkan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri menargetkan sebesar sebesar Rp. 207.464.550 dan terealisasi sebesar Rp. 128.644.171,32 dengan Tingkat capaian sebesar 62,01%.
7. Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri.
   - Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun menargetkan sebesar Rp. 392.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 223.655.867 dengan Tingkat capaian sebesar 57,03%

- Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 392.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 223.655.867 dengan Tingkat capaian sebesar 57,03%.
- Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri dengan indikator jumah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri mentargertkan sebesar Rp. 38.360.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.140.000 dengan Tingkat capaian sebesar 2,97%.
- Capaian Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan indikator jumah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat mentargertkan Sebesar Rp. 336.280.000 dan terealisasi sebesar Rp.217.275.867 dengan Tingkat capaian sebesar 64,61%.
- Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri mentargertkan Sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan mentargertkan 17.560.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.240.000 dengan Tingkat capaian sebesar 29,84%

8. Capaian Program pengendalian izin usaha industri
   - Capaian Program pengendalian izin usaha industri Indikator Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industri di SIINas menargetkan sebesar Rp. 59.502.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.750.783,02 dengan Tingkat capaian sebesar 36,55%.
   - Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (UIU), Izin Perluasan Usaha Indstry (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan

menargetkan sebesar Rp. 59.502.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.750.783,02 dengan Tingkat capaian sebesar 36,55%.

- Capaian Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA)dengan indikator jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA) bagi penanaman modal dalam negeri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menargetkan sebesar Rp. 59.502.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.750.783,02 dengan Tingkat capaian sebesar 36,55%

9. Capaian Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.
   - Capaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan Indikator Persentase Pengelolaan Data dalam SIINas menargetkan sebesar Rp. 92.736.000 dan terealisasi sebesar Rp. 23.132.785,42 dengan Tingkat capaian sebesar 24,94%
   - Capaian Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenanangan Kabupaten/kota yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 92.736.000 dan terealisasi sebesar Rp. 23.132.785,42 dengan Tingkat capaian sebesar 24,94%
   - Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui system informasi industri nasional (SIINas) dengan Indikator Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 31.566.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.232.785,42 dengan Tingkat capaian sebesar 60,93%
   - Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas dengan indikator Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan Perusahaan

kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 61.170.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.900.000 dengan Tingkat capaian sebesar 6,38%.

10. Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Survei Keputusan Masyarakat menargetkan sebesar Rp 10.816.299.815 dan terealisasi sebesar Rp 6.712.347.882,94 dengan Tingkat capaian sebesar 62,06%

- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menargetkan sebesar Rp. 30.896.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.543.000 dengan Tingkat capaian sebesar Rp. 79,44%

- Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan menargetkan sebesar Rp. 23.926.000 dan terealisasi sebesar Rp. 18.739.000 dengan Tingkat capaian sebesar 78,32%
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menargetkan sebesar Rp. 4.524.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.930.000 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 86,87%.
- Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan menargetkan sebesar Rp. 2.446.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.874.000 dengan Tingkat capaian sebesar 76,61%.
- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 8.820.096.118 dan terealisasi sebesar Rp. 5.437.998.471 dengan Tingkat capaian sebesar 62,03%
- Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menargetkan sebesar Rp. 8.766.213.118 dan terealisasi sebesar Rp. 5.437.998.471 dengan Tingkat capaian sebesar 62,03%.
- Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi keuangan SKPD yang diterbitkan menargetkan

sebesar Rp. 49.980.000 dan terealisasi sebesar Rp. 33.320.000 dengan Tingkat capaian sebesar 66,67%.

- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 1.316.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 2.587.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.963.000 dengan Tingkat capaian sebesar 75,88%
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 824.970.680 dan terealisasi sebesar Rp. 594.195.813 dengan Tingkat capaian sebesar 72,03%
- Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 8.998.400 dan terealisasi sebesar Rp. 6.924.700 dengan Tingkat capaian sebesar 76,95%
- Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan Indikator Jumlah Paket bahan logistik yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 46.152.880 dan terealisasi sebesar Rp. 44.452.075 dengan Tingkat capaian sebesar 96,31%
- Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 634.221.400 dan terealisasi sebesar Rp. 462.685.880 dengan Tingkat capaian sebesar 72,95%
- Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.440.000 dengan Tingkat capaian sebesar 74,00%.
- Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu dengan Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu menargetkan sebesar Rp. 23.250.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 10.862.600 dengan Tingkat capaian sebesar 46,72%.

- Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menargetkan sebesar Rp. 106.348.000 dan terealisasi sebesar Rp. 64.830.558 dengan Tingkat capaian sebesar 60,96%.
- Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan menargetkan sebesar Rp. 321.174.005 dan terrealisasi sebesar Rp. 191.360.000 tingkat capaian sebesar 59,58%.
- Sub Kegiatan Pengadaan mebel dengan indikator jumah paket mebel yang disediakan menargetkan sebesar Rp. 7.200.000 terrealisasi sebesar Rp.7.200.000 tingkat capain sebesar 100%
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan menargetkan sejumlah Rp. 313.974.005 dan terrealisasi sebesar Rp. 184.160.000 tingkat capaian sebesar 58,65%.
- Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 636.939.812 dan terealisasi Rp. 361.106.336,94 dengan Tingkat capaian sebesar 56,69%
- Sub Kegiatan penyedia jasa surat menyurat dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diterbitkan menargetkan Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 dengan Tingkat capaian sebesar 100%
- Sub kegiatan penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 381.907.812 dan terealisasi sebesar Rp 193.726.839 dengan Tingkat capaian sebesar 50,73%.
- Sub Kegiatan penyedia jasa pelayanan umum kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan menargetkan sebesar Rp. 250.032.000 dan terealisasi sebesar Rp. 162.379.497,94 dengan Tingkat capaian sebesar 64,94%
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Indikator Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diterbitkan

menargetkan sebesar Rp. 176.341.200 dan terealisasi sebesar Rp. 65.292.262 dengan Tingkat capaian sebesar 37,03%

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 64.620.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.600.048 dengan Tingkat capaian sebesar 34,97%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 79.176.200 dan terealisasi sebesar Rp. 25.357.214 dengan Tingkat capaian sebesar 32,03%.
- Sub Kegiatan pemeliharaan mebel dengan Indikator Jumlah mebel yang di pelihara menargetkan sebesar Rp. 4.995.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.960.000 dengan Tingkat capaian sebesar 99,30%.
- Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara menargetkan sebesar Rp. 27.550.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.375.000 dengan Tingkat capaian sebesar 44,92%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 5.882.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.569.000 dengan Tingkat capaian sebesar 43,68%.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Indikator jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD menargetkan sebesar Rp. 5.882.000 dan terealisasi sebesar 2.569.000 dengan Tingkat capaian sebesar 43,68%.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Tujuan Meningkatnya Produktivitas sektor industri dan perdagangan		
2	Meningkatnya Nilai Produktivitas industri		
3	Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	ketersediaan sumber daya alam, permintaan konsumen yang meningkat, perbaikan infrastruktur dan transportasi, stabilitas makroekonomi dan kebijakan yang mendukung, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, adopsi teknologi baru, investasi asing (FDI), dan kondisi ekonomi global yang mendukung	- Infrastruktur yang kurang Memadai - Tingginya Biaya Logistik dan Distribusi - Keterbatasan Akses Pembiayaan - Persaingan Asing dan Produk Impor - Kurangnya Sumber Daya Manusia Berkualitas - Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi - Ketidakstabilan Ekonomi dan Politik - Permintaan Pasar yang Melemah - Isu Keamanan dan Kepastian Hukum

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
	Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	- Legalitas dan Kepatuhan Regulasi - Tertib Administrasi dan Pendataan Gudang - Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) - Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Mitra Usaha - Penguatan Rantai Pasok dan Distribusi Barang - Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	- Belum Tersedianya Data seluruh Pelaku usaha yang memiliki Gudang Di Kabupaten Nganjuk - Kurangnya Pemahaman dari Pemilik Gudang - Ketidaksesuaian Persyaratan Administratif
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Regulasi dan Kebijakan Pemerintah - Kepastian Hukum dan Tata Ruang - Kebutuhan Pengendalian dan Pengawasan Usaha - Dorongan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi - Digitalisasi dan Sistem Pelayanan Terpadu - Tekanan Sosial dan Tuntutan Masyarakat	- Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Toko Swalayan Belum selesai - Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha - Kurangnya Sosialisasi dan Fasilitasi
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Adanya sarana dan prasara yang baik, aman dan nyaman untuk para pedagang	- Adanya efisiensi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Pasar
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		

	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- SDM pengelola pasar yang terampil	- Belum adanya perda dan Perbup terkait Pengelolaan Pasar - Adanya pergeseran anggaran Anggaran sekolah pasar dialihkan untuk kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	- Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan - Perlindungan Konsumen - Kebijakan Pemerintah dan Kepatuhan Regulasi	- Kurangnya Sistem Informasi yang Terintegrasi - Minimnya Kapasitas SDM - Ketidakpatuhan Pelaku Usaha - Fluktuasi Harga yang Cepat - Keterbatasan Infrastruktur Logistik - Keterbatasan Jangkauan Pengawasan

	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	- Stabilitas harga bahan pokok - Ketersediaan barang kebutuhan pokok - Pengendalian inflasi - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Meningkatkan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok - Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan - Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan	- Keterbatasan sumber daya manusia - Distribusi yang tidak merata - Perubahan harga yang cepat - Kendala distribusi dan logistik - Kualitas dan kuantitas barang yang disediakan
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	- Kebutuhan Meningkatnya Produksi Pertanian - Penggunaan yang Efektif dan Efisien - Pencegahan Penyalahgunaan	- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten - Keterbatasan Dana dan Sarana Prasarana - Ketidaktepatan Data dan Informasi - Distribusi dan Pengawasan yang Terlalu Luas

		dan Penyelewengan - Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan - Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Kebijakan Pemerintah - Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat - Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat	- Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Petani - Penyimpangan dalam Penyaluran
4	Program Pengembangan Ekspor		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	- Kualitas Produk yang Tinggi - Inovasi dan Diferensiasi Produk - Branding dan Pemasaran yang Efektif	- Regulasi dan Kebijakan Perdagangan Internasional - Persaingan Global - Kendala Logistik dan Infrastruktur - Keterbatasan Kapasitas Produksi dan Sumber Daya

		- Sertifikasi dan Standar Internasional - Dukungan Pemerintah - Jaringan dan Relasi Bisnis Internasional - Kemampuan Adaptasi dengan Selera Pasar - Teknologi Produksi dan Logistik yang Handal	- Kurangnya Promosi dan Informasi Pasar - Perbedaan Budaya dan Preferensi Konsumen - Faktor Internal Perusahaan
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	- Kualitas Produk - Inovasi dan Desain - Branding dan Packaging - Sertifikasi dan Standar Internasional - Pelayanan Pelanggan dan After Sales - Promosi dan Pemasaran Internasional - Stabilitas dan Kehandalan Pasokan - Keberlanjutan dan Etika Produksi - Harga yang Kompetitif	- Kualitas Produk yang Tidak Konsisten - Harga yang Tidak Kompetitif - Kurangnya Inovasi dan Diferensiasi Produk - Masalah Branding dan Pemasaran - Hambatan Regulasi dan Administrasi - Persepsi Negatif Terhadap Negara Asal - Kurangnya Pengetahuan tentang Pasar Internasional - Masalah Logistik dan Distribusi

5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
	pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan		
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang	Kebutuhan Akurasi UTTP dalam transaksi perdagangan (Kebenaran alat ukur) untuk transaksi yang adil	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tera / tera ulang dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Tuntutan perlindungan konsumen dari masyarakat yang membutuhkan kebenaran alat ukur	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban tera / tera ulang setiap tahunnya terhadap alat ukur yang dimiliki.
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	- Dukungan Regulasi dan Kebijakan - Partisipasi Pelaku Usaha Lokal - Kesadaran Konsumen	- Minimnya Kesadaran Masyarakat - Kurangnya Dukungan Stakeholder - Infrastruktur dan Media Promosi yang Terbatas

		- Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung - Kerjasama dengan Berbagai Pihak - Dukungan Pendanaan - Potensi Produk Lokal yang Unggul - Edukasi Berkelanjutan kepada masyarakat sekitar	- Persaingan dengan Produk Impor - Sumber Daya Manusia yang Terbatas - Distribusi Produk yang Belum Merata
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Akan dilakukan pendataan dengan informasi terbaru	Kurangnya kelengkapan data informasi terkait dalam pelaksanaan pengawasan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Telah dilakukan pendampingan bagi IKM melalui pemberdayaan industri hasil tembakau dan pelatihan batik	Kurangnya pemahaman bagi IKM dalam peningkatan daya saing
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Dilakukan sosialisasi sebagai bentuk pelindungan bagi	Keterbatasan informasi terkait fasilitasi jaminan produk halal bagi IKM

		masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar jaminan produk halal	
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	Untuk pengawasan industri telah di lakukan setiap bulan dan rapat koordinasi serta survei lapangan dilaksanakan pada saat ada pengajuan permohonan vertek IUI	Industri besar, menengah dan kecil belum paham tentang persyaratan mengurus legalitas/Perijinan
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI		

	Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Melakukan pendataan IKM secara kontinu setiap bulan	Belum adanya Data yang valid tentang IKM
	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha industri dalam penyampaian data aktifitas produksi ke SIINas	Masih kurangnya pelaku usaha industri dalam mengakses SIINas sebagai pengembangan industri
10	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Data tidak segera di kirim ke sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Ketersediaan Barang Diinaproc banyak yang belum tersedia
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		adanya Perubahan Rincian Pada jumlah Unit yang diadakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Masih adanya Pengelola pasar rakyat yang membayar secara mandiri sehingga antara tagihan pembayaran dan yang seharusnya dibayar tidak sama
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		
	Pemeliharaan Mebel		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi Renja sampai Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa :

1. Tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sudah selaras dengan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026
2. Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dengan Indikator sasaran:

   1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

   Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdata dalam database direktori industri kecil menengah tahun 2025 sejumlah 1580 Industri kecil menengah Sedangkan Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah sampai dengan tribulan III adalah 9 sehingga total jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdata dalam database direktori industri kecil menengah sampai dengan tribulan III tahun 2025 adalah 1589 Industri kecil menengah. Indikator Kinerja Pertambahan Jumlah Industri kecil dan Menengah menargetkan sebesar 2,2% dan terealisasi sebesar 1,67% dengan Tingkat capaian sebesar 75,91%.
3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran :

   1. Persentase Peningkatan omzet sektor perdagangan

      indikator Persentase Peningkatan omzet sektor perdagangan yang menargetkan sebesar 2,18% dan terealisasi sebesar 1,71% dengan Tingkat capaian sebesar 78,44%.
4. Capaian realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sampai Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 16.327.769.065,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.034.357.462,50 tingkat capaian sebesar 61,46%.

IV.2. Tindak Lanjut

Terhadap beberapa permasalahan yang ada dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada periode berikutnya, terdapat langkah-langkah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain:

1. Melaksanakan rapat Evaluasi Setiap bulan untuk Meminimalisir hambatan pencapaian kinerja dan anggaran

2. Melaksanakan Kegiatan sesuai anggaran kas yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
4. Melaksanakan Pencermatan RKA sebelum ditetapkan Target masing- masing sub kegiatan